

# **BAHAN E-LEARNING**

## **PENDIDIKAN PANCASILA**



**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA**

[www.bsi.ac.id](http://www.bsi.ac.id)

## PERTEMUAN 9

### PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan *way of life* bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertindak laku. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas, dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai (*value-free*).

Mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan *moral guidance* yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkrit, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya.

Kemudian, mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia.

#### A. Pengertian Etika, Etiket dan Aliran Etika

Istilah “**etika**” berasal dari bahasa Yunani, “*Ethos*” yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk (Bertens, 1997: 4-6). Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika (Sastrapratedja, 2002: 81).

Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Nilai itu sendiri merupakan kualitas yang tidak *real* karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, nilai membutuhkan pengembalian untuk berada (Frondizi, 2001: 7). Misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi.

Lacey menjelaskan bahwa paling tidak ada enam pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya.
2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang.
3. Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri.
4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan.
5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertindak laku bagi dirinya dan orang lain.
6. Suatu “Objek nilai”, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. (Lacey, 1999: 23).

Dengan demikian, nilai sebagaimana pengertian butir kelima (5), yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak.

Namun, orang acap kali mencampuradukkan istilah “etika” dan “etiket”? Padahal, keduanya mengandung perbedaan makna yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal usul katanya, etika berasal dari kata “*ethos*”, sedangkan etiket berasal dari kata “*etiquette*”. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif. tetapi Etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan, serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket, misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket (Bertens, 1997: 9).

Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan (virtue), artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada What should I be?, atau “saya harus menjadi orang yang bagaimana?”. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, ksatriya, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, ughari (bersahaja), disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran (Mudhofir, 2009: 216--219). Orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri dan disiplin, sebagaimana nasihat Hippocrates berikut ini.

Adapun aliran-aliran Etika sebagai berikut;

- a. Etika Keutamaan atau Kebajikan mempelajari perbuatan manusia itu baik atau buruk. Watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, ksatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, ughari (bersahaja), disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran (Mudhofir, 2009: 216-219)

- b. Etika Teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan (Mudhofir, 2009: 214). Aliran-aliran etika *teleologis*, meliputi *eudaemonisme*, *hedonisme*, *utilitarianisme*.
- c. Etika Deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral (yang baik) dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis (Mudhofir, 2009: 141).

## B. Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, yaitu tercermin dalam empat tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan.

- a. **Kebijaksanaan** artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal – rasa – kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak (Tuhan) dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius.
- b. **Kesederhaaan** artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan.
- c. **Keteguhan** artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan
- d. **Keadilan** artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya (Mudhofir, 2009: 386).

### 1. Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika

Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam "*The classical theory of concepts*" menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep adalah pembawa arti. Suatu konsep tunggal bisa dinyatakan dengan bahasa apapun. Konsep bisa dinyatakan dengan "*Hund*" dalam bahasa Jerman, "*Chien*" dalam bahasa Prancis, dan "*Perro*" dalam bahasa Spanyol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari

berbagai macam karakteristik. Berbagai pengertian konsep dikemukakan oleh beberapa pakar. Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Pengertian konsep yang lain adalah sesuatu yang umum atau representatif intelektual yang abstrak dari suatu situasi, suatu objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Suatu konsep adalah elemen dari preposisi seperti kata adalah elemen dari kalimat. Konsep juga adalah abstrak di mana mereka menghilangkan perbedaan dari segala sesuatu dalam ekstensi, memperlakukan seolah-olah mereka identik. Konsep adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya tanpa adanya pengecualian (Jacobsen, dkk, 2009). Sehingga konsep Pancasila adalah percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, serta solidaritas atau kesetiakawanan sosial.

Pancasila sebagai bagian dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia, pastinya memiliki konsep yang sesuai dengan keadaan bangsa sehingga dibentuklah Pancasila. Mulai dari keadaan hubungan sosial yang baik, hingga hubungan sosial yang negatif. Yang nantinya diharapkan, Pancasila dapat menjadi landasan untuk melakukan setiap hal, terutama dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal yang cukup memprihatinkan bahwa di kalangan mahasiswa pengetahuan tentang Pancasila sedemikian terbatas mulai dari segi akses tentang pendidikan Pancasila namun juga pemahaman secara mendalam tentang nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan kapasitas seorang mahasiswa. Dari sini muncul persoalan lagi dimana nilai-nilai dan esensi dari Pancasila telah dipolitisi untuk kepentingan pihak tertentu dengan memanfaatkan sifat idealis mahasiswa yang ditunjang dengan terbatasnya pengetahuan mereka tentang nilai-nilai Pancasila. Inilah yang menyebabkan banyak aksi protes yang menggunakan Pancasila sebagai landasan atau sebagai alasan. Sehingga peran mahasiswa yang seharusnya bisa menjadi *problem solver* malah menambah permasalahan dengan aksi atau aktivitas yang berbau politik dan kepentingan dari pihak tertentu.

Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila sesuai dengan konsep nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan masalah di atas, konsep pendidikan nilai-nilai Pancasila memang sangat penting diberlakukan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pendidikan Pancasila dapat memperkuat jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*) (Abdulgani, 1979: 14).

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, sebagai contoh:

- a. Percaya kepada Tuhan dan toleran. Sesuai dengan sila yang pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” konsep Pancasila adalah percaya kepada Tuhan. Sehingga tidak ada warga negara Indonesia yang tidak memiliki Tuhan atau memiliki kepercayaan Atheis (tidak percaya akan adanya Tuhan). Di Indonesia, terdapat 6 agama/kepercayaan yang diakui, yaitu Islam, Budha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman

agama ini, maka diwajibkan untuk bangsa Indonesia agar memiliki rasa toleransi, dan tenggang rasa terhadap sesama umat beragama.

- b. Gotong royong. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke-2 yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Salah satu budaya bangsa Indonesia adalah gotong royong, yang mencerminkan sebagai bangsa yang memiliki adab yang baik.
- c. Musyawarah. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke-4. Maksudnya, setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk memberikan aspirasi atau pendapatnya kepada sesama maupun kepada pemerintah. Musyawarah juga berarti pemerintahan Indonesia yang tidak otoriter terhadap kekuasaannya yang memang diberikan dari rakyat Indonesia ini.
- d. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Sesuai dengan Pancasila sila ke-3 dan ke-5 “Persatuan Indonesia” dan “Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Solidaritas berarti bersatu, kompak, saling merangkul seperti kata pepatah “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”, sehingga tidak ada bangsa lain ataupun negara lain yang dapat memecahbelahkan Indonesia, walaupun Indonesia adalah negara dengan keadaan sosial yang majemuk dan heterogen. Kesetiakawanan sosial, yaitu keadilan yang memang menjadi hak warga Indonesia, baik dalam interaksi sosial maupun dalam perlakuan hukum pemerintah. Sehingga tidak adanya diskriminasi bangsa.

Nilai-nilai di atas merupakan konsep pendidikan yang diajarkan Pancasila kepada bangsanya, khususnya pemuda yang menyandang status sebagai mahasiswa. Pemuda yang nantinya akan memegang sistem pemerintahan di Indonesia.

## 2. Etika Pancasila

Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (*mitsein*), cinta tanah air, berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.

Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam empat tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal – rasa – kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak (Tuhan) dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius.

Kesederhaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya (Mudhofir, 2009: 386).

### **3. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika**

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “urgere” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “urgent” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting (Saleh dan Muhibb, 2004).

Berkaitan dengan urgensi pendidikan pancasila di perguruan tinggi, yaitu seberapa jauh pentingnya pendidikan pancasila bagi mahasiswa dilaksanakan di perguruan tinggi. Sebelum membahas lebih jauh akan dibahas terlebih dahulu mengenai hakekat pancasila. Memahami hakekat pancasila berarti memahami makna Pancasila. Artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa pancasila mempunyai fungsi dan peran tersendiri. Sudah jelas pancasila dasar negara, namun disamping itu pancasila mempunyai fungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya bahwa pandangan hidup sebuah bangsa lahir dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkan.

Melihat betapa pentingnya fungsi pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia maka sudah seharusnya pancasila dipahami secara menyeluruh dan mendalam oleh orangnya sendiri. Salah satu sarana dalam proses memahami pancasila adalah melalui pendidikan formal mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Pendidikan pancasila sudah diatur sedemikian rupa dalam sebuah peraturan. Dasar hukum pelaksanaan pendidikan pancasila di lembaga pendidikan formal bersumber pada TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GPHN yang menetapkan antara lain : pendidikan pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, pendidikan moral pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan khususnya nilai-nilai 45 pada generasi muda, dilanjutkan dan makin ditingkatkan disemua jenis jenjang pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Perguruan tinggi yang berperan dalam mengembangkan dan memperdalam pengetahuan dan mengajarkannya dan memperoleh pengetahuan. Bahkan berbagai masalah yang sedang terjadi di negara ini bisa dilestarikan dari memperdalam dan menemukan sebuah solusi melalui pemahaman yang mendalam tentang Pancasila. Melalui Pendidikan Pancasila, diharapkan juga para mahasiswa memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa secara berkesinambungan dan konsisten, dengan cita-cita tujuan nasional. Disamping itu mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani serta memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Selain itu dengan pengajaran ditingkat perguruan tinggi memungkinkan mahasiswa menerapkan sehingga nilai-nilai moral Pancasila terkandung dalam sila-sila Pancasila masuk dalam kepribadian mahasiswa.

Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut:

- a. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa.

- c. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara, seperti: kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta, pada tahun 2013 yang lalu.
- d. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia.
- e. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Schapell Corby.
- f. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus *panama papers* yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak.

Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai *Leading Principle* bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis-rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memerlukan bantuan atau jasa si pejabat agar urusannya lancar. Si pejabat menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan hadiah. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang menerima sesuatu dalam konteks politik sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk suap (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016).

### C. Perlunya Pancasila sebagai Sistem Etika

Permasalahan diatas menunjukkan pentingnya setiap masyarakat menjadikan Pancasila sebagai sistem Etika untuk menjadi penuntun dalam berperilaku. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena berisi tuntunan nilai-nilai moral dalam berperilaku. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah:

1. Dekadensi moral kalangan masyarakat terutama generasi muda. Untuk itulah perlunya pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan karakter bisa dilakukan baik secara formal maupun non formal. Secara formal dilakukan di Sekolah dari tingkat Taman anak-kanak sampai Perguruan Tinggi dengan menanamkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab dan lain-lain. Contoh-contoh dekadensi moral, antara lain: penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk Pendidikan karakter di sekolah-sekolah.
2. Korupsi akan bersimharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk (*good and bad*). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik (*good*) dan buruk (*bad*). Archie Bahm dalam *Axiology of Science*, menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk (korupsi), maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archie Bahm, “Maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan” (Bahm, 1998: 58). Pada tahun



2005 menurut *Pacific Economic and Risk Consultancy* Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Kasus Korupsi yang ditangani KPK sampai Nopember 2018 berjumlah 891 pelaku korupsi yang sudah dijerat sebanyak 61,17 persen di antaranya atau 545 koruptor yang ditangani KPK berasal dari unsur politik. Dari 545 aktor politik yang dijerat KPK terdiri dari 69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, 104 kepala daerah. Selain itu, terdapat 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut. (<https://www.republika.co.id>). Data CPI Indonesia Tahun 2017 yang dirilis oleh Transparency International (TI) Tahun 2017 pun menunjukkan stagnasi IPK Indonesia di angka 37 salah satunya disebabkan turunnya indeks PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) hingga tiga poin,

3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Berikut ini diperlihatkan gambar tentang iklan layanan masyarakat tentang pendidikan yang dibiayai dengan pajak.
4. Melemahnya penghargaan akan hak anggota masyarakat yang satu terhadap hak anggota masyarakat yang lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan diberbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. sosialisasi sistem etika Pancasila, juga penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)
5. Sejumlah persoalan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Masalah lingkungan antara lain. (<https://nasional.sindonews.com>)
  - a. Sampah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016
  - b. Banjir. Persoalan lingkungan lainnya yang menjadi PR masyarakat Indonesia adalah banjir. Selain tingginya curah hujan, banjir merupakan dampak yang dihasilkan dari berbagai permasalahan lingkungan lain seperti gunung sampah, rusaknya hutan dan berubahnya fungsi sungai.
  - c. Sungai tercemar; Pencemaran air sungai terjadi akibat ulah manusia yang membuang limbah atau sisa industri ke sungai.
  - d. Pemanasan Global. Yakni proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan permukaan bumi. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global seperti rusaknya ekosistem makhluk hidup serta tenggelamnya pulau-pulau kecil karena naiknya permukaan air laut akibat mencairnya lapisan es di kutub.
  - e. Pencemaran Udara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna sepeda motor terbanyak di dunia. Data yang diperoleh dari Mabes Polri, jumlah kendaraan yang terdaftar di Indonesia per tanggal 1 Januari 2018 mencapai 111 Juta, atau tepatnya 111.571.239 unit kendaraan. Sepeda motor yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 82% atau 91.085.532 unit sepeda motor Menyusul Mobil Pribadi dengan kontribusi 12% atau sebanyak 13.253.143 unit mobil. Sisanya kontribusi dari Mobil Bus, Mobil Barang, dan Kendaraan Khusus. Kondisi ini memunculkan masalah pencemaran udara. (Nasuha, 2018)

- f. Rusaknya Ekosistem laut. Menjaga ekosistem laut menjadi sebuah keharusan. Sayangnya, data Pusat Penelitian Oseanografi LIPI menunjukkan sekitar 35,15% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi tidak baik, 25,06% dalam kondisi cukup, 23,4% dalam kondisi baik dan hanya 6,39% dalam kondisi sangat baik
  - g. Sulitnya air bersih. Salah satu daerah yang cukup lama mengalami masalah ini adalah Papua. Distribusi sumber daya air (SDA) yang tidak merata menjadi salah satu penyebab masyarakat sulit mendapatkan air bersih.
  - h. Kerusakan hutan Pembalakan liar atau illegal logging menjadi penyebab utama dari berkurangnya lahan hutan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas hutan di Indonesia saat ini mencapai 124 juta hektare. Namun, sejak 2010 sampai 2015, Indonesia kehilangan luas hutannya hingga 684.000 hektare per tahunnya. Maraknya penebangan pohon dilahan hutan konservasi dapat berpengaruh terhadap kerusakan aliran sungai. Selain itu juga pembakaran hutan secara liar akan menimbulkan kabut asam yang dapat mengganggu kesehatan manusia.
  - i. Pencemaran Tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Akibatnya tanah menjadi tidak lagi murni seperti sebelumnya. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini di antaranya mengurangi kesuburan tanah, rusaknya ekosistem mahluk hidup serta timbulnya wabah penyakit.
- 
1. Masih maraknya peredaran narkoba, meskipun berkali kali BNN menangkap para pengedar, peredaran narkoba selalu ada, karena masih banyak pengguna narkoba di Indonesia, bahkan sudah merambah ke penegak hukum, anggota DPR. Dari situs <https://bnn.go.id/> dari tahun 2018 sampai awal Maret 2019 kasus narkoba 1120, total tersangka 1647. Penangkapan narkoba jenis abu terbesar tahun 2017, berhasil diamankan 1 ton dari Pantai Anyer. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahgunaan narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017 lalu. Bahkan hampir 1 juta orang diantaranya telah menjadi pecandu. Kebanyakan dari korban-korban tersebut adalah remaja. Menanggapi fenomena ini pemerintah telah menetapkan negara kita sedang berada dalam keadaan darurat dalam penyalahgunaan narkoba
  2. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatas namakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror menangkap 396 tersangka tindak pidana terorisme sepanjang tahun 2018. Jumlah itu menunjukkan adanya peningkatan jumlah tersangka dari 2017 silam. Pada 2018 ada 396 pelaku atau naik 113 persen (Ariefana dan Ria, 2018).
  3. Pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM (Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).
  4. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95

- juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).(<https://www.bps.go.id>).
5. Penegakan hukum yang masih kurang dari rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum yang tidak menentu. Seperti kasus Narkoba Schapell Corby (pembawa 1,4 kg ganja di tas papan peluncurnya) tahun 2004, meskipun sudah dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman 20 tahun penjara, dan tidak pernah mengaku bersalah, namun dapat grasi dari Presiden. Kasus ini menunjukkan bahwa jarang terjadi terpidana yang tidak mengaku bersalah akan mendapatkan grasi.
  6. Banyaknya orang kaya tidak membayar pajak, penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus *Panama Papers* yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Perbuatan tersebut sangat merugikan negara di saat negara membutuhkan dana untuk pembangunan. Seperti diberitakan di TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menangkap buron tindak pidana pajak sebesar Rp 10,68 miliar, Albertus Irwan Tjahjadi Oedi di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2018 (Antara, 2018).
  7. Selain permasalahan di atas, permasalahan lain yang terkadang muncul adalah masalah TKI yang bekerja di luar negeri, baik TKI ilegal atau tidak ilegal yang terancam hukuman. Hal ini perlu pembenahan serius mengenai pengiriman TKI ini. Terakhir, Adelina Jemira Sao, TKI asal NTT di Malaysia, pulang dalam peti mati setelah meninggal dunia akibat penyiksaan pada 18 Februari 2018. Kasus penyiksaan Adelina dikecam publik secara luas karena kejinya siksaan orang tua majikan Adelina dengan membiarkannya tidur di samping kandang anjing. <https://dunia.tempo.com>

Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pengrusakan lingkungan. Tentunya bagi para penggiat lingkungan sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberikan penghargaan. Penggiat lingkungan adalah orang-orang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan. Merekalah Pahlawan lingkungan hidup. Dengan Lingkungan hidup yang nyaman melahirkan generasi muda yang sehat dan bersih sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal yang diharapkan akan timbul adalah sikap dan mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab. Sikap ini disertai dengan:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa
2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu “memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945”.

Dalam perjuangan non fisik, harus tetap memegang teguh nilai-nilai ini disemua aspek kehidupan, khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, dan nepotisme; menguasai IPTEK, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing; memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; dan berpikir obyektif rasional serta mandiri.

